

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah, Penjabat Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016>

### Buku

Alkosta, A. (Ed.). (1997). *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan dalam Identitas Hukum Nasional*. Fakultas Hukum UII.

Arifin, F., & Kurnia, F. R. (2019). *Penjabat Kepala Daerah* (Cetakan I). Thafa Media.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

J, K. (2009). *Kepemimpinan kepala daerah: pola kegiatan kekuasaan dan perilaku kelapa daerah dalam pelaksanaan atonomi daerah*. Sinar Grafika.

Kansil, C. S. T. (2005). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksar.

Manan, B, & Tjandra, W. R. (2009). *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Manan, Bagir. (2000). *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Universitas Padjajaran.

- Moleong, J. L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Revisi ed.)*. Grasindo.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2005). *Kamus umum bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Cet 3)*. Balai Pustaka.
- Prastowo, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Cet 3)*. AR-RUZZ MEDIA.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan kepala daerah langsung filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia*. Pustaka Belajar.
- Rahayu, A. S. (2017). *Pengantar pemerintahan daerah : kajian teori, hukum, dan aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Sastropetro, S. (1990). *Pendapat Umum, dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial*. Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setiawan, D. B. (2011). *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wood, Angela, (2005). *Demystifying ‘Good Governance’: an Overview Of World Bank Governance Reforms and Conditions*. Dublin : Trocaire.

### **Skripsi dan Tesis**

- Abullah, A. G. (2010). *Catatan Kuliah Politik Hukum*. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahman, U. (2020). *Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta Periode 2017 - 2022)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ryantomo, A. (2019). *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dalam Pemberian Izin*

- Pariwisata (Studi Kasus Izin Tempat Rekreasi The Lost World Castle di Kabupaten Sleman). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Setyaningsih, D. F. (2018). Implikasi Pengangkatan Pejabat Gubernur Sulawesi Barat Berdasarkan Keppres Nomor 143/P2016 Tentang Pengesahan, Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur Dan Wakil Gubernur Dihadungkan Dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.
- Suhana, S. (2017). Analisa Opini Publik Terhadap Pemberitaan Pemberlakuan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Dari Perspektif Islam (Studi Pada Masyarakat Rt 04/Rw02 Kelurahan Talang Mandi Sebangau Duri,Riau). Skripsi. Riau: Universitas Islam Riau.

## **Jurnal**

- Ahuluheluw, S. S. (2013). PENTINGNYA TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SORONG TIMUR KOTA SORONG. *Jurnal Governance*, 5(1).
- Arifin, M. Z., & Rahmatullah, R. M. (2019). Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Thengkyang*. 2(1), 125–142.
- Bahtiar, R. A. (2022). Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah. *Info Singkat (PUSLIT BKD)*. XIV, No. 8(10), 1–6.
- Gedeona, H. T. (2010). Pandangan Ilmu Administrasi Publik Mengenai Signifikansi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(4), 308–318.  
<http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/303>.
- Irwan, L., J. A. R., & Jaya, I. (2021). Peningkatan Kesadaran Politik Pada Generasi Muda di Kabupaten Maros. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 2(2), 78.  
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpmh/article/view/18019>.
- Juanda, & Juanda, O. (2022). Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Keamanan Nasional*, VIII(1), 192–219.

- Mahropiono, M. (2016). Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (Studi Jabatan Gubernur Di Dki Jakarta). *Badamai Law Journal*. 1(2), 434. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1827>
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Patricia, L. (2023). Krisis Demokrasi Akibat Pengangkatan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Tanpa Suara Rakyat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1465–1473.
- Rahmazani. (2023). Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024. *Jurnal Konstitusi*, 20(2)
- Silaban, J. T., Yuwanto, & Astrika, L. (2013). Persepsi Mahasiswa Fisip Undip Terhadap Demokratisasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2(3), 1–16. <https://www.neliti.com/publications/105563/persepsi-mahasiswa-fisip-undip-terhadap-demokratisasi-di-indonesia>
- Sugiarto, A. H. (2019). Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Suhaimi, E., & Yasin, M. (2022). PROBLEMATIKA PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH. *Jurnal Hukum Tripantang*, 8(1), 55–65
- Titiswasanany, W. (2013). Democratic Governance dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Sekretaris Jendral DPR-RI*, 12.
- Tohadi. (2018). Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Yang Berasal Dari Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat). *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 68. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1178>
- Usman, S. (2022). Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai). *JSSH: SAINS, SOSIAL & HUMANIORA*, 2(1), 63–73. <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jssh/article/view/1144>

## Internet

Anggraini, T. (2022, May 11). Akuntabilitas Pengisian Penjabat Kepala Daerah. *Mediaindonesia.Com*.

<https://mediaindonesia.com/opini/491530/akuntabilitas-pengisian-penjabat-kepala-daerah>. Diakses pada 21 Mei 2023.

BBC.com. (2022, May 12). *Pj Gubernur: Menteri Tito klaim penunjukan sudah “demokratis”, tapi mengapa dituding “tidak transparan” dan rentan “dipolitisasi”?*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61382329>.

Diakses pada 11 Desember 2022.

BBCNews. (2007). *Jakarta Holds Historic Election*. <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/6936276.stm>. Diakses pada 5 Januari 2023.

CNNIndonesia. (2022). Wewenang dan Larangan untuk Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221018145319-20-862155/wewenang-dan-larangan-untuk-heru-budi-sebagai-pj-gubernur-dki-jakarta>. Diakses pada 19 November 2022.

Hadi, A. (2022, Oktober 9). Masyarakat Harapkan Pj Gubernur DKI Jakarta Memiliki Pengalaman Khusus. *antvklik.com*. <https://www.antvklik.com/headline/565863-masyarakat-harapkan-pj-gubernur-dki-jakarta-memiliki-pengalaman-khusus?page=all>. Diakses pada 19 November 2022.

Interaktif.kompas.id. (2017). *Gubernur Jakarta, 1945 Hingga Kini*. <https://interaktif.kompas.id/baca/gubernur-jakarta/>, Diakses pada 5 Januari 2023.

Komisi Aparatur Sipil Negara. (2022). KASN: Presiden Perlu Mencegah Disrupsi Netralitas Penjabat Kepala Daerah. *Kasn.Go.Id*. <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-presiden-perlu-mencegah-disrupsi-netralitas-penjabat-kepala-daerah>. Diakses pada 21 Mei 2023.

Kompas.com. (2022). *101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan pada 2022, Ini Daftarnya*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/15552661/101-kepala-daerah-habis-masa-jabatan-pada-2022-ini-daftarnya>. Diakses pada 12

Oktober 2022.

Kompas.com. (2022, June 14). *Meneropong Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah*.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/14/15365851/meneropong-pengangkatan-penjabat-kepala-daerah>. Diakses pada 11 Desember 2022.

RM.id. (2022, October 11). Terpilih Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Diminta Selesaikan Masalah Pokok Ibu Kota. *RM.Id.* <https://rm.id/baca-berita/megapolitan/143797/terpilih-jadi-pj-gubernur-dki-jakarta-heru-diminta-selesaikan-masalah-pokok-ibu-kota>. Diakses pada 27 Desember 2022.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Ihwal Urusan Pemerintahan Umum.

(2021, December 24). Sekretariat Kabinet. <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/>. Diakses pada 23 November 2022.